

**PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH,
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA DAN GAYA KEPEMIMPINAN
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh :
Riana Anggraeni Afifah
NIM. 15.0102.0152

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019**

**PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH,
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA DAN GAYA KEPEMIMPINAN
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperolah
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Disusun Oleh:

Riana Anggraeni Afifah

NIM.15.0102.0152

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019**

SKRIPSI

PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN GAYA KEPEMIMPINAN
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Riana Anggraeni Afifah

NPM 15.0102.0152

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal **25 Juli 2019**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Wawan Sadtyo Nugroho, SE, M.Si, Ak, CA

Pembimbing I

Pembimbing II

Tim Penguji

Nur Laila Yuliani, SE, M.Sc, Ak

Ketua

Wawan Sadtyo Nugroho, SE, M.Si, Ak, CA

Sekretaris

Veni Soraya Dewi, SE, M.Si

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal, **16 AUG 2019**

Dra. Marlina Kurnia, M.M.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riana Anggraeni Afifah

NIM : 15.0102.0152

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo)

adalah benar-benar hasil karya Saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya ini tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 25 Juli 2019

Pembuat Pernyataan,



Riana Anggraeni Afifah

NIM. 15.0102.0152

RIWAYAT HIDUP

Nama : Riana Anggraeni Afifah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 10 Februari 1997
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Krombangan Donorojo RT 1/8
Mertoyudan Magelang
Alamat Email : rianaafifah333@gmail.com
Pendidikan Formal :
SD (2003–2009) : SD Negeri Donorojo
SMP (2009 -2012) : SMP Negeri 3 Mertoyudan
SMA (2012-2015) : SMA Negeri 1 Salaman
Perguruan Tinggi (2015-2019) : S1 Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang

Pengalaman Organisasi :

- Pengurus Himpunan Mahasiswi Akuntansi (HMA) 2017/2018
- Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Periode 2018/2019

Magelang, 20 Juli 2019
Peneliti



Riana Anggraeni Afifah
NIM. 15.0102.0152

MOTTO

“Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari besok. Jangan sampai berhenti bertanya,

“(Albert Einstein)”

Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita

(Qs At-taubah : 40)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo)”**.

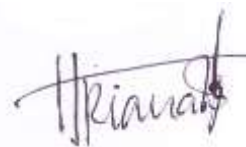
Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Starta Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi itu, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh. Widodo, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Drs. Marlina Kurnia, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Wawan Sadtyo N, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah mengorbankan waktu, tenaga pikiran untuk membimbing serta memberikan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang, sekaligus dosen penguji yang sudah membantu memberikan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi saya.
5. Ibu Veny Soraya Dewi, S.E., M.Si. selaku penguji yang sudah membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
6. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai harganya.
7. Ayah, Ibu, Adik dan keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan untuk kelancaran penyusunan skripsi ini.

Magelang, 25 Juli 2019

Peneliti



Riana Anggraeni Afifah
NIM. 15.0102.0152

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Halaman Riwayat Hidup.....	iv
Motto.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
Abstrak.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan.....	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	
A. Telaah Teori.....	13
1. Teori Agency (<i>Agency Theory</i>)	13
2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	14
3. Standar Akuntansi Pemerintah.....	16
4. Sistem Pengendalian Internal.....	22
5. Kompetensi Sumber Daya Manusia	24
6. Gaya Kepemimpinan.....	25
B. Telaah Penelitian Terdahulu	26
C. Pengembangan Hipotesis.....	29
D. Model penelitian	35
 BAB III METODA PENELITIAN	
A. Populasi dan Sampel.....	36
B. Teknik Pengambilan Sampel	36
C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	37
D. Metode Analisis Data.....	39
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Sampel Penelitian	45
B. Statistik Deskriptif	46
C. Uji Kualitas Data	49
1. Uji Validitas	49
2. Uji Reliabilitas	51
3. Analisis Regresi Linier Berganda	51
D. Pengujian Hipotesis	53

1. Uji Determinasi	53
2. Uji F	53
3. Uji t.....	54
E. Pembahasan	57
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	63
B. Keterbatasan Penelitian.....	63
C. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penelitian LKPD	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 2.2 Lanjutan Penelitian Terdahulu	28
Tabel 2.3 Lanjutan Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Definisi dan Pengukuran Variabel	37
Tabel 3.2 Lanjutan Definisi dan Pengukuran Variabel	38
Tabel 3.3 Lanjutan Definisi dan Pengukuran Variabel	39
Tabel 4.1 Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian	45
Tabel 4.2 Profil Responden	46
Tabel 4.3 Hasil Statistik Deskriptif Variabel.....	47
Tabel 4.4 <i>Cross Loading</i>	49
Tabel 4.5 Lanjutan <i>Cross Loading</i>	50
Tabel 4.6 Uji Reliabilitas.....	51
Tabel 4.7 Regresi Linier Berganda.....	51
Tabel 4.8 Uji Determinasi.....	53
Tabel 4.9 Uji F.....	53
Tabel 4.10 Uji t.....	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Penelitian.....	35
Gambar 3.1 Penerimaan Uji F	43
Gambar 3.2 Penerimaan Uji t.....	44
Gambar 4.1 Uji F Kualitas Laporan Keuangan	54
Gambar 4.2 Penerimaan Hipotesis 1	55
Gambar 4.3 Penerimaan Hipotesis 2	55
Gambar 4.4 Penerimaan Hipotesis 3	56
Gambar 4.5 Penerimaan Hipotesis 4	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuisisioner penelitian	68
Lampiran 2	Daftar sampel	76
Lampiran 3	Daftar responden	78
Lampiran 4	Tabulasi Hasil Data Mentah	81
Lampiran 5	Tabulasi Hasil Kuisisioner	101
Lampiran 6	<i>Cross Loading</i>	116
Lampiran 7	Statistik Deskriptif	117
Lampiran 8	Uji Validitas.....	118
Lampiran 9	Uji Reliabilitas.....	128
Lampiran 10	Uji Regresi.....	130
Lampiran 11	Daftar Penerimaan Kuisisioner	131
Lampiran 12	Surat Ijin Riset.....	134

ABSTRAK

**PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo)**

Oleh:

Riana Anggraeni Afifah

Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban penyajian laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, serta untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan gaya kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini OPD di Kabupaten Purworejo Metode pengambilan sampel yang digunakan ialah *purposive sampling* dengan sampel sebanyak 84 responden. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan pemerintah daerah, sedangkan sistem pengendalian internal dan gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci : *Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Gaya Kepemimpinan, Kualitas Laporan Keuangan*

ABSTRAK

**PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo)**

**Oleh:
Riana Anggraeni Afifah**

Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban penyajian laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, serta untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan gaya kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini OPD di Kabupaten Purworejo Metode pengambilan sampel yang digunakan ialah *purposive sampling* dengan sampel sebanyak 84 responden. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan pemerintah daerah, sedangkan sistem pengendalian internal dan gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci : *Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Gaya Kepemimpinan, Kualitas Laporan Keuangan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi sehingga sebagai bentuk pertanggungjawaban penyajian laporan keuangan harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum dan disajikan secara wajar. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, serta untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi publik tersebut, baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah tersebut sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem yang handal. mengalami perkembangan yang luar biasa beberapa waktu terakhir ini. Perkembangan ini juga dialami oleh pemerintah (Nurillah, 2014). Pemangku kepentingan memerlukan informasi-informasi yang bermanfaat dan memiliki nilai untuk digunakan dalam pengambilan keputusan (Suwardjono, 2005). Informasi yang bermanfaat adalah informasi yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam melakukan pengambilan keputusan.

Kondisi ini semakin menguatkan tuntutan akuntabilitas atas organisasi pemerintahan. Salah satunya akuntabilitas finansial, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada para pemangku kepentingan yang dilaksanakan secara periodik. Kebutuhan akan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum, menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik.

Wujud dari pertanggungjawaban tersebut dengan upaya yang dapat dilakukan adalah menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik dan merupakan media sebuah entitas untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada publik selain itu juga berfungsi untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja pemerintahan, maka dari itu informasi yang disajikan harus memiliki nilai agar informasi keuangan tersebut dapat bermanfaat bagi penggunaannya, menandakan laporan keuangan tersebut berkualitas.

Pemerintah daerah menjadikan laporan keuangan menjadi media bagi sebuah entitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik yang menggambarkan keluaran atau hasil dari kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur

sehingga dapat menjelaskan kinerja dan tanggung jawab pengelolaan kinerja dan tanggung jawab pengelolaan anggaran selama satu periode tertentu. Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 terdapat empat kelompok utama yang membutuhkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah, empat kelompok utama tersebut, yaitu: wakil rakyat, lembaga pemeriksa, lembaga pengawas, dan masyarakat. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman serta pemerintah.

Pemerintahan daerah bertanggung jawab untuk menyajikan dan melaporkan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang bermanfaat dan sesuai bagi kebutuhan pemakainya, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Undang-undang 71 tahun 2010 tentang SAP dijelaskan bahwa laporan yang disajikan itu berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal dan dapat dibandingkan dan dipahami. Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi, untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkompetensi, maka kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkompetensi dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang

pemerintahan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ditunjukkan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, serta untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya.

Kualitas LKPD setiap tahunnya akan mendapatkan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan dimana opini BPK diberikan berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksa Keuangan Negara dengan tujuan untuk mendapatkan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dengan mendasarkan pada empat kriteria : (1) efektivitas sistem pengendalian internal (SPI) (2) ketaatan terhadap perundang-undangan, (3) kecukupan pengungkapan (disclosure) dan (4) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), berarti dapat dikatakan bahwa laporan keuangan entitas tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Ada empat opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Seiring dengan perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia, maka wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia adalah menguatnya tuntutan atas kualitas informasi laporan keuangan pemerintah (Nurillah, 2014).

Kenaikan opini dari tahun 2016 terjadi pada seluruh tingkat pemda. Capaian opini WTP bertambah dari 275 LKPD (66%) menjadi 298 LKPD (72%). Kenaikan opini dari WDP menjadi WTP sebanyak 45 LKPD dan dari TMP menjadi WDP pada 7 LKPD dikarenakan pemda telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tahun 2016 dengan melakukan perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga akun-akun dalam laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo selama lima tahun terakhir ditunjukkan pada tabel 1.1

TABEL 1.1.
Perkembangan LKPD dari tahun 2014-2018

No	Nama Pemda	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kabupaten Temanggung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

DPP

2	Kota Magelang	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kabupaten Magelang	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP
4	Kabupaten Wonosobo	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
5	Kabupaten Purworejo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: IHPS BPK RI Semester II Tahun 2018

Tabel 1.1 terlihat bahwa pemerintah kabupaten Purworejo mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam tahun anggaran 2014-2018. Pemilihan pemerintah daerah kabupaten Purworejo sebagai objek penelitian karena pemerintah daerah kabupaten Purworejo satu satunya yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian tanpa adanya penambahan dengan paragraf penjelas dari BPK sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 di wilayah Kedu. Kabupaten Purworejo dinilai berhasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) selama 5 tahun terakhir dan dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. Ini merupakan capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

Opini dari BPK dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan dikeluarkan apabila kualitas laporan keuangan sudah memiliki 4 kriteria yang ada menurut PP No. 71 Tahun 2010 yaitu relevan dimana laporan keuangan dikatakan relevan memiliki unsur-unsur seperti manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap, kemudian yang kedua andal dimana informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur dan dapat diverifikasi. Ketiga dapat dibandingkan yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan

keuangan periode sebelumnya. Terakhir adalah dapat dipahami dimana informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Kenyataan yang terjadi di kabupaten Purworejo bahwa BPK menilai OPD di kabupaten Purworejo telah memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, efektifitas pengendalian intern, kepatuhan terhadap perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan. Opini laporan keuangan yang diberikan oleh BPK juga mempertimbangkan materialitas penyajian akun antar komponen laporan keuangan dan keseluruhan informasi laporan keuangan. Peningkatan opini dari tahun ke tahun diharapkan pemerintah kabupaten Purworejo dapat mempertahankan opini tersebut dan meningkatkan kompetensi dalam mengelola aset serta melakukan perbaikan kinerja didalam pemerintahannya khususnya mengenai laporan keuangan dan peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di kabupaten Purworejo. Namun meskipun sudah mendapat opini wajar tanpa pengecualian tetapi masih terdapat kelemahan sistem pengendalian di OPD kabupaten Purworejo yaitu diantaranya penataan dan pengamanan aset tetap, ketertiban administrasi atas penggunaan dana BOS, ketertiban pengelolaan pajak daerah, hibah serta bantuan sosial yang belum tertib.

Penelitian (Mahardini & Miranti, 2018) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan akan semakin baik apabila

didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Hal ini juga didukung oleh penelitian (Sa'adah et al, 2017) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian (Wijayanti & Handayani, 2017) membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah didukung oleh penelitian (Yuliani & Agustini, 2016) bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu penelitian (Setiawan & Gayatri, 2017) menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah penelitian ini sejalan dengan penelitian (Widari & Sutrisno, 2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian ini tidak didukung oleh penelitian (S Purnomo, 2014) serta penelitian (Nurhasanah et al, 2018) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini mengembangkan penelitian (Mahardini & Miranti, 2018) tentang Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. Perbedaan mendasar dengan penelitian terdahulu diantaranya adalah **pertama**, menambahkan variabel sistem pengendalian internal karena dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik dapat mencegah kecurangan akuntansi sehingga kualitas laporan keuangan menjadi lebih baik dan

sistem pengendalian internal merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir asimetri informasi dalam *theory agency* dengan cara *monitoring cost*. Sehingga dengan adanya variabel sistem pengendalian internal dapat mencegah kecurangan akuntansi, sehingga kualitas laporan keuangan menjadi baik dan diharapkan dapat meminimalisir asimetri informasi yang akan terjadi. (Mardinan, Dahlan, & Fitriyah, 2018) pelaksanaan sistem pengendalian internal yang baik mampu meningkatkan kehandalan informasi dan mencegah inkonsistensi dan memfasilitasi proses audit laporan keuangan karena dapat dijadikan dasar untuk memelihara lingkungan internal di dalam organisasi tersebut. Penelitian (Mardinan et al., 2018) menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kedua, menambahkan variabel gaya kepemimpinan karena gaya kepemimpinan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir asimetri informasi dalam *theory agency* dengan cara *monitoring cost*. Sehingga dengan adanya variabel gaya kepemimpinan diharapkan dapat meminimalisir asimetri informasi yang akan terjadi (Agung & Gayatri, 2018). Gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh seseorang akan mempengaruhi sikap dan perilaku anggota organisasi sehingga berpengaruh pula pada kinerja anggota dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Penelitian (Agung & Gayatri, 2018) menunjukkan hasil bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, semakin baik cara

memimpin seorang dalam pimpinan sebuah organisasi maka kualitas laporan keuangan akan meningkat.

Ketiga, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini dilakukan pada OPD di Kabupaten Purworejo, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Provinsi Banten . Sampel tersebut dipilih karena di wilayah Kabupaten Purworejo mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 5 tahun berturut turut, sehingga peneliti ingin mengetahui faktor- faktor apa yang menjadikan kualitas laporan keuangan OPD di Kabupaten Puworejo selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah?
2. Apakah terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah?
3. Apakah terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah?
4. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji dan menganalisis pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah.

3. Menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah.
4. Menguji dan menganalisis gaya kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah.

D. Kontribusi Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi peneliti terhadap bukti empiris dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah.

2. Secara Praktis

Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menjadikan suatu referensi maupun tinjauan secara nyata untuk meningkatkan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan pengaruh gaya kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi alasan memilih judul penelitian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berisi teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok-pokok masalah dalam penelitian berupa telaah teori, hasil penelitian terdahulu, hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan pembahasan. Bagian ini menjadi titik perhatian karena dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan program SPSS berupa analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas data, analisis regresi dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Literatur

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) *agency theory* merupakan hubungan *principal* dengan *agent* dapat dikatakan hubungan keagenan yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh *principal* yang menggunakan *agent* untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan *principal* untuk menyelaraskan tujuan antara *principal* dan *agent*. Dalam upaya mengatasi masalah keagenan yaitu asimetri informasi menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik oleh *principal* maupun *agent*. Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan yaitu *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku *agent*. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. *Residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal*.

Menurut (Mardiasmo, 2005), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak

dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu : 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal) dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat dan DPRD (akuntabilitas dual horizontal).

Praktik pelaporan keuangan dalam organisasi merupakan konsep yang didasari teori keagenan. Dalam laporan keuangan, pemerintah (*agent*) mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah (*principal*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung dan tidak langsung. Tuntutan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik semakin menguat terkait dengan perlu dilakukannya transparansi dan pemberian informasi kepada publik semakin menguat terkait dengan perlu dilakukannya transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah taraf atau derajat suatu laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan serta transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Untuk

mengukur Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menurut PP No. 71 Tahun 2010, sebagai berikut:

- a. Relevan, laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini, memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan

4. Lengkap

Informasi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

- b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur,

serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik; penyajian yang jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

d. Dapat dipahami

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

3. Standar Akuntansi Pemerintah

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Standar akuntansi sangat penting sebagai pedoman untuk pembuat laporan keuangan dan sebagai salah satu mekanisme pengendalian. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas informasi

keuangan serta menyulitkan dalam pengendalian (Mardiasmo, 2009). Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Ketentuan Penutup Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Penerapan SAP Berbasis AkruaI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI menjadi penerapan SAP Berbasis AkruaI. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akruaI dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan h ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar

akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun yaitu pada Tahun 2015. SAP Basis kas adalah SAP yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan

anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif sebagai berikut :

1. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

2. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pernyataan standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.

3. PSAP 03 Laporan Arus Kas

Tujuan Pernyataan Standar Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

4. PSAP 04 Catatan Arus Kas

Tujuan Pernyataan Standar Catatan atas Laporan Keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah.

5. PSAP 05 Akuntansi Persediaan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan. Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepengusaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

6. PSAP 06 Akuntansi Investasi

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

7. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

8. PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tujuan Pernyataan Standar Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan.

9. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

10. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

11. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose*

financial statements) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud.

12. PSAP 12 Laporan Operasional

Tujuan pernyataan standar Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

4. Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Unsur-unsur pengendalian SPI yang diterapkan dipemerintahan menurut PERMENDAGRI no 60 tahun 2008 terdiri atas unsur :

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan. Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri dari, identifikasi risiko dan analisis risiko. Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dari sifat tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif.

5. Pemantauan Pengendalian Internal

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal. Pemantauan sistem pengendalian internal dilaksanakan melakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

5. Kompetensi Sumber Daya Manusia

(Moeheriono, 2009) mendefinisikan kompetensi adalah :’ kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu”. Seseorang yang memiliki kompetensi akan bekerja dengan pengetahuan dan ketrampilannya sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, intuitif dan dengan pengalamannya bisa meminimalisir kesalahan. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Peran sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atau perusahaan sangat mempunyai arti yang sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri, mengingat pentingnya peran sumber daya manusia dalam sebuah organisasi maka sumber daya manusia menjadi faktor penentu sebuah organisasi atau

perusahaan tersebut. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga.

Sumber daya manusia sebagai salah satu unsur dalam organisasi dapat diartikan sebagai manusia yang bekerja dalam suatu organisasi. SDM dapat disebut juga sebagai personil, tenaga kerja, pekerja, karyawan, potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Atau potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal nonmateril dalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Kompetensi adalah sebagai berikut Suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

Perangkat daerah harus memiliki pengalaman di bidang keuangan dan didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan merupakan hal terpenting dalam pengelolaan keuangan yang baik. Sehingga dalam menerapkan sistem akuntansi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Apabila sumber daya manusia tidak mampu memahami dan menerapkan akuntansi dengan baik maka itu akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang di buat, dan tidak sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan.

6. Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan merupakan sikap atau ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai. Dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seseorang pemimpin baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya. Kepemimpinan merupakan suatu topik bahasan yang klasik, namun tetap sangat menarik untuk diteliti karena tiada habisnya untuk dibahas. Kepemimpinan adalah sikap atau cara yang dipergunakan oleh seseorang untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain (Khairina, 2012). Seorang pemimpin harus dapat menciptakan iklim kerja yang positif sehingga mampu melakukan pengembangan terhadap diri anggotanya serta nantinya diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Pemimpin merupakan pemeran utama yang akan menentukan arah keberhasilan dari suatu organisasi. Seseorang yang menjalankan fungsi manajemen berkewajiban mempengaruhi karyawan yang dibawahinya agar mereka tetap melaksanakan tugas dengan baik, memiliki dedikasi terhadap organisasi dan tetap merasa berkewajiban untuk mencapai tujuan organisasi (Sedarmayanti, 2007). Gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dapat berpengaruh pada sikap dan perilaku anggotanya dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sehingga berpengaruh pada sikap dan perilaku anggotanya dalam menyelesaikan tugas tugas nya sehingga berpengaruh pula

pada hasil kerja anggota organisasinya. Semakin baik cara memimpin seseorang pimpinan dimana karyawan tersebut bekerja, maka akan semakin mempengaruhi kinerja dari karyawan tersebut.

A. Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kumpulan dari artikel artikel dan jurnal-jurnal yang sudah diteliti oleh para peneliti yang digunakan untuk dasar acuan dan pedoman dalam mengerjakan peneltian ini yaitu dengan variabel independen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan di Indonesia. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil
1	Agung & Gayatri (2018)	Gaya Kepemimpinan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Gaya Kepemimpinan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan TI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2	Mardinan et al, (2018)	Sumber Daya Manusia, Gaya Kepemimpinan, Teknologi dan Sistem Pengendalian Internal	Sumber Daya Manusia, Gaya Kepemimpinan, Teknologi dan

3	Nurhasanah et al, (2018)	Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia	Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia
---	--------------------------	--	--

Tabel 2.2
Lanjutan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel	Hasil
			berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4	Mahardini dan Miranti (2018)	Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia	berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
5	Setiawan & Gayatri, (2017)	Akuntansi berbasis akrual, Sistem Pengendalian Internal dan Motivasi Kerja	Akuntansi berbasis akrual, Sistem Pengendalian Internal dan Motivasi Kerja berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

6	Widari dan Sutrisno (2017)	Sistem Pengendalian Internal, Organisasi	Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan
7	Khotimatus et al, (2017)	Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal	Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem

Tabel 2.3
Lanjutan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel	Hasil
8	Yuliani & Agustini (2016)	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Teknologi Informasi, Kompetensi SDM & Sistem Pengendalian Internal	Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif

9	Herniyasa et al, (2014)	Gaya Kepemimpinan dan Good Unniversity Governance	Gaya Kepemimpinan dan Good Unniversity Governance berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
---	----------------------------	---	--

Sumber : Beberapa Penelitian Terdahulu

B. Pengembangan Hipotesis

1. Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah. (Vicky, 2013)

Agency theory merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Mecking, 1976). Dalam *Agency theory* terdapat *bonding cost* yang merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi

mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Standar akuntansi pemerintah merupakan mekanisme *bonding cost* karena membutuhkan adanya suatu patokan dalam pemerintahan agar *agent* dapat bertugas sesuai dengan kepentingan *principal*.

Menurut penelitian Nurhasanah et al, (2018) menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian Mahardini & Miranti (2018) juga menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berbeda dengan penelitian Yuliani & Rahmawati (2016) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian yang sudah ada dan teori yang sudah diuraikan diatas, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H1. Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Liziana, 2017)

Agency theory merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agent*. Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Mecking, 1976). Dalam *agency theory* terdapat *monitoring cost* yang merupakan biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku *agent*. Hubungan *principal* dengan *agent* terjadi ketika pihak *principal* memberikan mandat kepada *agent* untuk memberikan laporan keuangan yang berkualitas yaitu laporan yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada pihak *principal*. Sistem pengendalian internal merupakan mekanisme *monitoring cost* karena dengan adanya pengendalian intern maka dapat dijadikan acuan oleh pihak *agent* agar tujuan *principal* dan *agent* dapat berjalan selaras.

Penelitian oleh Nurillah (2014) menemukan hasil sistem pengendalian internal berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Penelitian tersebut didukung dengan penelitian oleh Khotimatus et al (2017) yang menemukan hasil sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Nurhasanah et al (2018) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian yang sudah ada dan teori yang sudah diuraikan diatas, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H2. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi atas ketrampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Sumber daya manusia yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Apabila sumber daya manusia tidak mampu memahami dan menerapkan akuntansi dengan baik maka itu akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dibuat dan tidak sesuai dengan standar yang telah diterapkan. Wibowo (2012).

Agency theory merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Mecking, 1976). Dalam *agency theory* terdapat *bonding cost* yang merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agents* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Kompetensi sumber daya manusia merupakan mekanisme *bonding cost* karena jika kompetensi yang dimiliki oleh *agent* cenderung baik maka mandat yang diberikan oleh *principal* kepada *agent* akan berjalan sesuai dengan keinginan *principal*.

Penelitian Agung & Gayatri (2018) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, semakin tinggi komitmen anggota SKPD Kabupaten Karangasem, maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. . Penelitian tersebut didukung dengan penelitian Angelin Christin Toban (2017) yang menemukan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian yang sudah ada dan teori yang sudah diuraikan diatas, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H3. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

4. Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Gaya kepemimpinan merupakan sikap atau ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai. Dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seseorang pemimpin baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya.

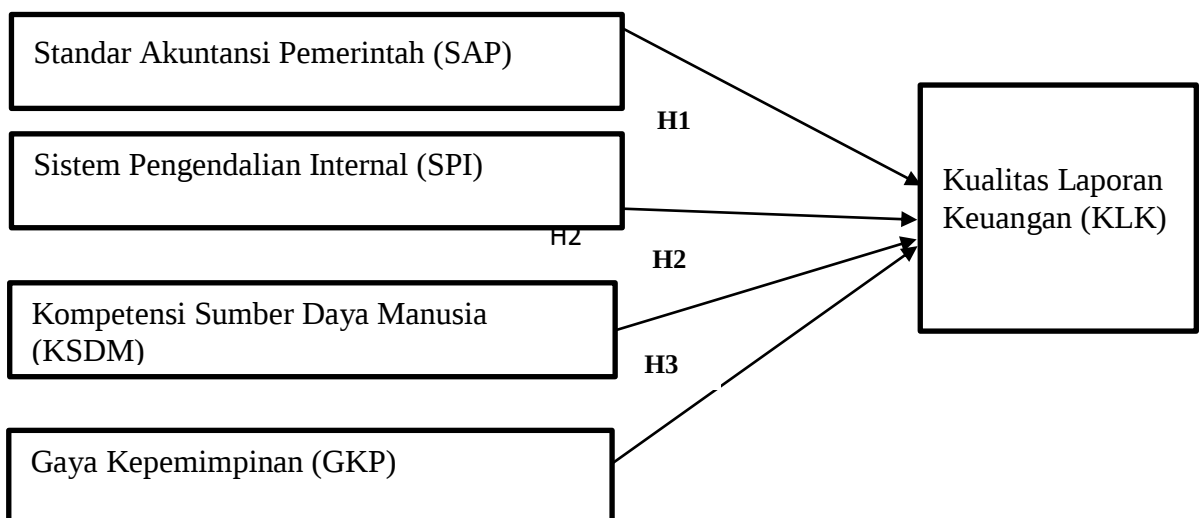
Agency theory merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent* Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Mecking, 1976). Dalam *agency theory* terdapat *monitoring cost* yang merupakan biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamatin dan mengontrol

perilaku *agent*. Hubungan *principal* dengan *agent* terjadi ketika pihak *principal* memberikan mandat kepada *agent* untuk memberikan laporan keuangan yang berkualitas yaitu laporan yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada pihak *principal*. Dengan gaya kepemimpinan yang baik maka pihak pemimpin dapat memonitoring bawahan agar semua berjalan sesuai dengan yang di harapkan sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Seperti pada penelitian Agung & Gayatri (2018) menunjukan jika gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh bagi kualitas laporan keuangan Daerah. Serta dalam penelitian Mardinan et al., (2018) gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Ulenget al., (2019) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian yang sudah ada dan teori yang sudah diuraikan diatas, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut

H4. Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

C. Model Penelitian



H4

Gambar 2.1

Model Penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipejari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2013). Populasi dalam penelitian ini adalah 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Purworejo. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2013). Pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala sub bagian keuangan, bendahara atau verifikator dan staff akuntansi atau keuangan yang merupakan pihak yang terlibat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
2. Memiliki masa kerja minimal 2 tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan dengan anggapan bahwa dalam masa periode tersebut sudah memiliki pengalaman.
3. Pendidikan minimal tingkat SMA.

B. Teknik Pengambilan Sampel

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh,

ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung. Data primer menjadi pilihan dalam mengumpulkan data karena data diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan pada aparatur pemerintah daerah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bekerja di lingkup pemerintah Kabupaten Purworejo yang terlibat dalam penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data/sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan memberikan kuisisioner yang langsung disebarakan kepada kriteria responden di Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo dengan menggunakan item-item pernyataan yang telah ditentukan dan dibatasi dalam pemberian jawaban dengan bobot 1 sampai 5.

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.1
Definisi dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala
1	Kualitas Laporan Keuangan	Menurut (Halim, 2012) laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial	Instrumen pernyataan mengacu pada penelitian Sukmaningrum dengan 4 indikator : 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat	Interval

Tabel 3.2
Definisi Dan Pengukuran Variabel
(Lanjutan)

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala
2	Standar Akuntansi Pemerintah	yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu . Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. (Bastian, 2007).	dibandingkan 4. Dapat dipahami Dengan model skala likert 5 sampai 1. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuisioner yang diambil dari penelitian (Ni Made Sudiarianti, 2015) dengan 11 indikator pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Dengan model skala likert 5 sampai 1.	Interval
3	Sistem Pengendalian Internal	Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan yaitu keuangan, kepatuhan terhadap hukum.	Instrumen 9 butir pertanyaan mengacu pada penelitian Sukmaningrum (2012) dengan 5 indikator : 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan Dengan model skala likert 5 sampai 1.	Interval
4	Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap dan	Instumen 9 butir pernyataan mengacu pada penelitian (Indriasari & Nahartyo, 2008) dengan empat	Interval

bertindak serta indikator yaitu :
menarik kesimpulan

Tabel 3.3
Definisi Dan Pengukuran Variabel
(Lanjutan)

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala
5	Gaya Kepemimpinan	yang dapat bekerja dengan mudah, cepat, intuitif dan dengan pengalamannya bisa meminimalisir kesalahan Moeheriono (2009) Gaya kepemimpinan adalah cara yang dimiliki oleh tiap pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan agar bawahnya dapat bekerja lebih semangat, disiplin dapat bekerja terhadap tugas yang telah diberikan. (Fitri, 2013)	1. Pendidikan 2. Tanggung jawab 3. Pengalaman 4. Pelatihan Dengan model skala likert 5 sampai 1. Instrumen 5 butir pernyataan mengacu pada penelitian (Herniyasa et al, 2014) dikur dengan 5 indikator: . Hubungan pemimpin dengan bawahan . Saling mempercayai . Menentukan hubungan dalam pemberian tugas . Menetapkan pola dan saluran komunikasi . Menguraikan pentingnya pekerjaan Dengan model skala likert 5 sampai 1.	Interval

Sumber : Data diolah 2019

D. Alat Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel yang digunakan dalam suatu penelitian. Selain itu, analisis ini

memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Statistik deskriptif dapat dilakukan pengujian untuk mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi engan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata - rata data sampel atau populasi. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (*mean*), simpangan baku (*standard deviation*), nilai maksimum dan nilai minimum dari semua variabel (Ghozali, 2018)

2. Pengujian Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018). Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan Analisis Faktor Konfirmatori (*CFA*) yaitu analisis faktor yang digunakan dengan tujuan untuk menguji atau mengkonfirmasikan secara empiris model pengukuran (*measurement model*) sebuah atau beberapa konstruk. Analisis faktor konfirmatori digunakan untuk menguji apakah suatu konstruk mempunyai unidimensionalitas atau apakah indikator-indikator autonom 1 sampai autonom 4 yang digunakan dapat mengkonfirmasikan sebuah konstruk atau variabel autonomi. Jika masing-masing indikator merupakan indikator pengukur konstruk autonomi maka akan memiliki nilai *loading factor* yang tinggi.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Pengujian reliabilitas yang digunakan adalah *one shot* atau pengukuran sekali saja, yang mana pengukuran hanya sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur konstruk tertentu menunjukkan tingkat reliabilitas yang digunakan adalah teknik *Cronbach alpha* yaitu pengujian yang paling umum digunakan. Sesuatu variabel dikatakan reliabel jika menunjukkan nilai *cronbach alpha* lebih besar daripada 0,70. Kriteria yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai *Cronbach Alpha* >0.70 , maka pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur variabel yang diamati “Reliabel”
- 2) Jika nilai *Cronbach Alpha* <0.70 , maka pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur variabel yang diamati “Tidak Reliabel”.

3. Analisis regresi linier berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan tujuan sekaligus, pertama meminimalkan penyimpangan antara nilai aktual dengan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada, (Ghozali, 2018). Peneliti ini menguji keseluruhan hipotesis digunakan model regresi sebagai berikut :

$$KLK = \alpha + \beta_1 PSAP + \beta_2 SPI + \beta_3 KSDM + \beta_4 GKP + e$$

Keterangan :

KLK = Kualitas laporan keuangan

PSAP = Penerapan standar akuntansi pemerintah

SPI = Penerapan sistem pengendalian internal

GKP = Pengaruh gaya kepemimpinan

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi Berganda

e = Error

4. Pengujian Hipotesis

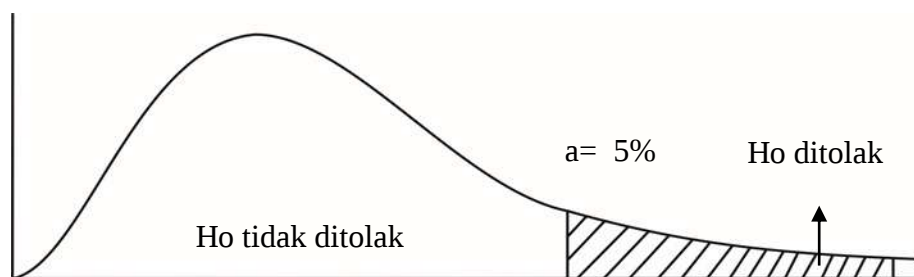
a. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Uji R^2 menunjukkan potensi pengaruh semua variabel independen yaitu Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Gaya Kepemimpinan terhadap variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan (KLK). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen yang sangat terbatas. Uji ini digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan variabel independen secara keseluruhan terhadap naik turunnya (variasi) nilai variabel dependen. Nilai koefisien determinasi mempunyai rentang antara 0 sampai 1. Apabila nilai R^2 semakin mendekati 1 maka semakin bagus atau tepat model yang dipakai untuk mewakili hubungan sesungguhnya. (Ghozali, 2018)

b. Uji F (*Goodness of fit test*)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir suatu nilai aktual (*goodness of fit*). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fit* atau tidak (Ghozali, 2018). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikan 5% dengan derajat kebebasan pembilang $df = k$ dan derajat kebebasan penyebut ($df = n - k - 1$) dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $P\ value < \alpha = 0,05$, maka model yang digunakan dalam penelitian bagus (*fit*).
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $P\ value > \alpha = 0,05$, maka model yang digunakan dalam penelitian tidak bagus (tidak *fit*).



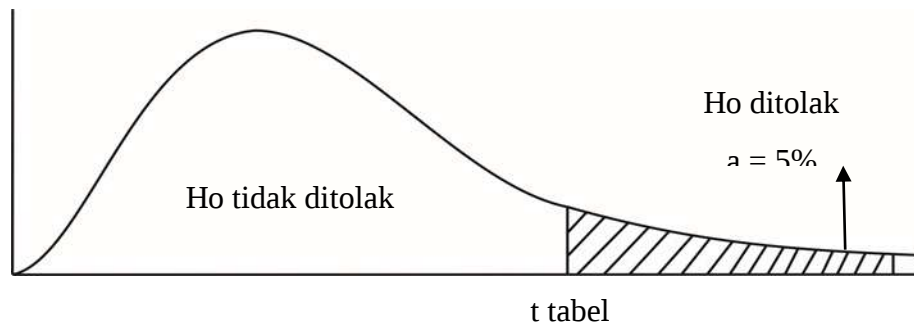
Gambar 3.1
Daerah Penerimaan Uji F

c. Uji Statistik t (*t-test*)

Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan

keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} masing-masing koefisien regresi dengan t_{tabel} (nilai kritis) dengan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = n-1$. Kriteria pengujian adalah :

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $p\ value < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau $p\ value > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a tidak diterima berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Penerimaan Uji t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan gaya kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan di OPD Purworejo dengan jumlah sampel 84 responden. Hasil uji determinasi menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan gaya kepemimpinan memberikan sumbangan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah walaupun dalam pengujian menunjukkan bahwa masih terdapat kemungkinan faktor-faktor lain diluar model penelitian ini. Hasil uji F menunjukan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang bagus atau (*fit*). Hasil uji t menunjukan bahwa standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sistem pengendalian internal dan gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

B. Keterbatasan Penelitian dan Hasil

1. Variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini hanya standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan gaya kepemimpinan. Masih banyak variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Sampel dalam penelitian ini adalah OPD di Kabupaten Purworejo.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat berguna sebagai masukan dan bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya adalah :

1. Penelitian berikutnya bisa menambahkan variabel lain yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti peran audit internal, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi atau variabel-variabel lainnya.
2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas obyek penelitian, misalnya OPD se-Karesidenan Kedu agar dapat digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, T. M., & . G. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Akuntansi*, 1253. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i02.p17>
- Badan Pemeriksa Keuangan(2018). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018. Melalui <http://www.bpk.go.id>. diunduh 9 Maret 2019
- Ghozali,I.(2018). Aolikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herniyasa, H., Fadilah,A., Nurcholisah, K., (2015) Pengaruh Penerapan Gaya Kepemimpinan dan Good University Goernance terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Politeknik Negeri Bandung).*Prosiding Akuntansi*
- Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. In *Salemba Empat*. <https://doi.org/ISBN: 978-979-061-226-6>
- Indriasari, D., & Nahartyo, E. (2008). Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang Dan Kabupaten Ogan Ilir). *Thesis*.
- Jensen, Mc and Meckling, W.H. (1976). Theor of the Firm, Managerial Behaviour Agkkkkensy Cost & Ownership Structure. *Journal of financial economic*. Vol 3 October.Pp 305-360.
- Khairina, N.I.(2012). Pengaruh Gaya Kepemimppinan dan Kaulitas Sumber Daya Manusia terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kineja Badan Layanan Umum (Studi pada Blu Universitas Diponegoro Semarang). *Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro*
- Mahardini, N. Y., & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Akuntansi :*

Kajian Ilmiah Akuntansi (Jak), 5(1), 22. <https://doi.org/10.30656/Jak.V5i1.500>

Mardiasmo.(2005). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta:Andi

Mardiasmo.(2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta : Andi.

Mardinan, T., Dahlan, M., & Fitriyah, F. K. (2018). Effect of Human Resources, Leadership Style, The Use of Information Technology and Internal Control on the Quality of Financial Statements (Study at Directorate General of Construction, Ministry of Works and Public Housing). *Journal of Accounting Auditing and Business*, 1(1), 47.

Moeheriono, M. (2007). Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Iii Terhadap Motivasi Kerja, Karier Dan Kompetensi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Timur. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 9(2), 217.

Ni Made Sudiaranti, I Gusti Ketut Agung Ulupui, & I G.A. Budiasih. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Penelitian Mandiri*, 4(71), 1–25.

Nurillah, A. S. dan D. M. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAKD, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E- Journal Akuntansi UNDIP*, 3, 1–13.

Nurhasanah, F., Sari., K (2018) Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kaulitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.*Jurnal Akuntanika*. Vol 4, No 1 Januari - Juni 2018.

_____.Permendagri No 60 Tahun 2008.

_____.PP Nomo 24 Tahun 2005.

_____, PP Nomor 71 Tahun 2010.

- Sa'adah, K., S.R., Subchan. (2017) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Moderasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan* 8(2).
- S Purnomo, B. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 276.
- Setiawan, I. W. N., & Gayatri. (2017). Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Pada Kualitas Laporan Keuangan. *Issn: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.21.1. Oktober (2017)*
- Sukmaningrum, T. (2012). Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota Semarang). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah*.
- Suwardjono. (2005) Teori Akuntansi : *Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
- Ulung, M., Nirwana., & Syamsudin. (2019). Pengaruh SumberDaya Manusia, Partisipasi Anggaran dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Informatika*. Vol.16.1
- Widari, L., & Sutrisno. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 5(10), 117–126.
- Wijayanti, R., & Handayani.,N. (2017) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Implementasi Akuntansi Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.

Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 14(1), 56–64.